

DAFTAR RAPERBUP 2026

| NO. | JUDUL RANCANGAN                                                                                                                   | PEMRAKARSA            | KETERANGAN                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3                     |                                   |
| 1   | PETUNJUK TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                   | DINDUKCAPIL           | PROSES<br>KOREKSI<br>BAGIAN HUKUM |
| 2   | PELAYANAN ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN DI<br>DESA/KELURAHAN                                                                       | DINDUKCAPIL           | PROSES<br>KOREKSI<br>BAGIAN HUKUM |
| 3   | PETUNJUK PELAKSANAAN<br>PERATURAN DAERAH NOMOR 10<br>TENTANG PENGELOLAAN PASAR<br>RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN<br>DAN TOKO SWALAYAN | DINKOPDAG             | BELUM                             |
| 4   | PETUNJUK PELAKSANAAN TANDA<br>DAFTAR GUDANG                                                                                       | DINKOPDAG             | PROSES<br>PENYUSUNAN              |
| 5   | PEMBERDAYAAN DAN<br>PENGEMBANGAN USAHA MIKRO                                                                                      | DINKOPDAG             | BELUM                             |
| 6   | PELAKSANAAN PERATURAN<br>DAERAH PENGUATAN DAN<br>PEMAJUAN KEBUDAYAAN<br>DAERAH                                                    | DINBUDPAR             | PROSES<br>PENYUSUNAN              |
| 7   | PERUBAHAN PEDOMAN<br>PENGELOLAAN ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN BELANJA<br>DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026                                 | BAGIAN<br>PEMBANGUNAN | DITETAPKAN                        |
| 8   | PEDOMAN PENGELOLAAN<br>ANGGARAN PENDAPATAN DAN<br>BELANJA DAERAH TAHUN<br>ANGGARAN 2027                                           | BAGIAN<br>PEMBANGUNAN | BELUM                             |
| 9   | RENCANA DETAIL TATA RUANG<br>KAWASAN PERKOTAAN<br>KRANGGAN TAHUN 2026-2046                                                        | DPUPR                 | BELUM                             |
| 10  | BANTUAN KESEHATAN                                                                                                                 | DINSOS                | PROSES<br>HARMONISASI             |
| 11  | RENCANA INDUK DAN PETA JALAN<br>PEMAJUAN IPTEK DAERAH<br>KABUPATEN TEMANGGUNG<br>TAHUN 2025-2029                                  | BAPPERIDA             | PROSES<br>KOREKSI<br>BAGIAN HUKUM |
| 12  | RENCANA KERJA PEMERINTAH<br>DAERAH KABUPATEN<br>TEMANGGUNG TAHUN 2027                                                             | BAPPERIDA             | PROSES<br>HARMONISASI             |
| 13  | PERUBAHAN RENCANA KERJA<br>PEMERINTAH DAERAH<br>KABUPATEN TEMANGGUNG<br>TAHUN 2026                                                | BAPPERIDA             | BELUM                             |
| 14  | RENCANA KERJA PERANGKAT<br>DAERAH TAHUN 2027                                                                                      | BAPPERIDA             | BELUM                             |
| 15  | RENCANA PENANGGULANGAN<br>KEMISKINAN DAERAH TAHUN<br>2025-2029                                                                    | BAPPERIDA             | BELUM                             |
| 16  | PEDOMAN PELAKSANAAN<br>BANTUAN KEUANGAN KEPADA<br>PEMERINTAH DESA YANG<br>BERSUMBER DARI ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN BELANJA       | BAPPERIDA             | PROSES<br>HARMONISASI             |

| NO. | JUDUL RANCANGAN                                                                                                                                | PEMRAKARSA        | KETERANGAN         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3                 |                    |
|     | DAERAH                                                                                                                                         |                   |                    |
| 17  | STRATEGI SANITASI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026-2030                                                                                         | BAPPERIDA         | BELUM              |
| 18  | KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026–2030                                 | BAPPERIDA         | PROSES FASILITASI  |
| 19  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG | BAPPERIDA         | BELUM              |
| 20  | KODE KLASIFIKASI, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS                                                | DINPUSIP          | BELUM              |
| 21  | PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS                                                                                                                      | DINPUSIP          | PROSES PENYUSUNAN  |
| 22  | ALIH MEDIA ARSIP                                                                                                                               | DINPUSIP          | BELUM              |
| 23  | KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH                                                              | BAGIAN ORGANISASI | DITETAPKAN         |
| 24  | KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KELAS B                          | BAGIAN ORGANISASI | PROSES PENYUSUNAN  |
| 25  | KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT                                                    | BAGIAN ORGANISASI | PROSES HARMONISASI |
| 26  | PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH                                     | BAGIAN ORGANISASI | PROSES HARMONISASI |
| 27  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                      | BAGIAN ORGANISASI | BELUM              |
| 28  | PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                            | BAGIAN ORGANISASI | PROSES HARMONISASI |
| 29  | PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025                                           | BPKPAD            | BELUM              |
| 30  | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027                                                                          | BPKPAD            | BELUM              |
| 31  | PENJABARAN PERUBAHAN                                                                                                                           | BPKPAD            | BELUM              |

| NO. | JUDUL RANCANGAN                                                                                                                                                                                              | PEMRAKARSA | KETERANGAN        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          |                   |
|     | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026                                                                                                                                                   |            |                   |
| 32  | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                       | BPKPAD     | PROSES PENYUSUNAN |
| 33  | STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2027                                                                                                                                              | BPKPAD     | BELUM             |
| 34  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026                                                                                                      | BPKPAD     | DITETAPKAN        |
| 35  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA                                                                                                                          | BPKPAD     | BELUM             |
| 36  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN                                                                                                                      | BPKPAD     | BELUM             |
| 37  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KHUSUSNYA KENDARAAN BERMOTOR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG. | BPKPAD     | BELUM             |
| 38  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH                                                                                                                         | BPKPAD     | PROSES PENYUSUNAN |
| 39  | TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026                                                                    | BPKPAD     | DITETAPKAN        |
| 40  | TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                                                                  | BPKPAD     | PROSES PENYUSUNAN |
| 41  | PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG                            | BPKPAD     | BELUM             |

| NO. | JUDUL RANCANGAN                                                                                                                                                                                                         | PEMRAKARSA | KETERANGAN        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          |                   |
| 42  | REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                                                                    | DINKES     | BELUM             |
| 43  | PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                                                          | DINKES     | BELUM             |
| 44  | PENGUNAAN SISA LEBIH PENGUNAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                                       | DINKES     | BELUM             |
| 45  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                              | RSUD       | BELUM             |
| 46  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH                                                                                   | RSUD       | PROSES PENYUSUNAN |
| 47  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG                                                  | RSUD       | BELUM             |
| 48  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG | RSUD       | BELUM             |
| 49  | PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN ATAU MINUMAN BERBAHAN PLASTIK                                                                                                | DPRKPLH    | BELUM             |
| 50  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA                              | DPRKPLH    | BELUM             |

| NO. | JUDUL RANCANGAN                                                                                                                                                | PEMRAKARSA          | KETERANGAN                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                              | 3                   |                             |
| 51  | PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI                                                                                        | DINDIKPORA          | PROSES PENYUSUNAN           |
| 52  | PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH                                                                                                                   | DINDIKPORA          | BELUM                       |
| 53  | TATA CARA PERIZINAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN                                                                                      | DINDIKPORA          | BELUM                       |
| 54  | PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT                                                                                  | DINDIKPORA          | PROSES PENYUSUNAN           |
| 55  | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF                                                                                                                            | DINDIKPORA          | PROSES HARMONISASI          |
| 56  | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU                                                                 | DINDIKPORA          | PROSES KOREKSI BAGIAN HUKUM |
| 57  | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG                                    | BAGIAN PEREKONOMIAN | PROSES PENYUSUNAN           |
| 58  | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG                          | BAGIAN PEREKONOMIAN | PROSES PENYUSUNAN           |
| 59  | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH APOTIK WARINGIN MULYO KABUPATEN TEMANGGUNG                          | BAGIAN PEREKONOMIAN | PROSES PENYUSUNAN           |
| 60  | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG                             | BAGIAN PEREKONOMIAN | PROSES PENYUSUNAN           |
| 61  | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI                                           | DINKOMINFO          | BELUM                       |
| 62  | BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN | SETWAN              | BELUM                       |

| NO. | JUDUL RANCANGAN                                                                                                                             | PEMRAKARSA                   | KETERANGAN                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                           | 3                            |                             |
|     | RAKYAT DAERAH                                                                                                                               |                              |                             |
| 63  | PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                                   | SETWAN                       | BELUM                       |
| 64  | PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM                                                                                        | BAGIAN HUKUM                 | PROSES PENYUSUNAN           |
| 65  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH                                                    | BAGIAN HUKUM                 | PROSES PENYUSUNAN           |
| 66  | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH                 | BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL | SELESAI HARMONISASI         |
| 67  | PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2027                                                                             | BAGIAN PROKOMPIM             | BELUM                       |
| 68  | PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA                                                                          | DPPPAPPKB                    | PROSES KOREKSI BAGIAN HUKUM |
| 69  | PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2027                                                                 | DINPERMADES                  | BELUM                       |
| 70  | STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2027                                                                        | DINPERMADES                  | BELUM                       |
| 71  | PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA                                                                                                        | DINPERMADES                  | BELUM                       |
| 72  | POS PELAYANAN TERPADU                                                                                                                       | DINPERMADES                  | PROSES KOREKSI BAGIAN HUKUM |
| 73  | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN TLOGOMULYO                                                                     | DINPERMADES                  | BELUM                       |
| 74  | PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG | DPMPTSP                      | PROSES PENYUSUNAN           |
| 75  | KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026-2030                                                                                  | BPBD                         | KOREKSI BAGIAN HUKUM        |
| 76  | KEMUDAHAN AKSES KEADAAN DARURAT BENCANA                                                                                                     | BPBD                         | BELUM                       |